



# KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KEHUMASAN DAN JURNALISTIK UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN

Ayler Beniah Ndraha<sup>1)</sup>, Eliyunus Waruwu<sup>2)</sup>, Dermawan Zebua<sup>3)</sup>, Asokhiwa Zega<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia.

Email: [aylerndraha@gmail.com](mailto:aylerndraha@gmail.com)

<sup>2)</sup> Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia.

Email: [eliyunuswaruwu@unias.ac.id](mailto:eliyunuswaruwu@unias.ac.id)

<sup>3)</sup> Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia.

Email: [dermawanzebua@unias.ac.id](mailto:dermawanzebua@unias.ac.id)

<sup>4)</sup> Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia.

Email: [asokhiwazega@gmail.com](mailto:asokhiwazega@gmail.com)

## Abstract

This research aims to explore the role of public relations and journalism institutions in enhancing transparency and public participation in governance. Transparency and participation are key elements that promote accountability and build trust between government and society. Using a mixed-methods approach, the study involved in-depth interviews, surveys, and document analysis at several government agencies in the district, as well as using a cross-sectional survey to measure public perceptions. The results show that public relations plays an important role in providing access to accurate and trustworthy information, which in turn improves government accountability. On the other hand, journalism serves as an independent watchdog that criticizes public policies and encourages community participation through critical coverage. Collaboration between public relations and journalism strengthens the government's ability to build positive relationships with the public, which is reflected in increased public involvement in decision-making. However, the study also identified challenges in terms of budget constraints, resistance to closed organizational cultures, and underutilization of technology in public communications. These findings highlight the importance of adequate policy support and resources for public relations and journalism to maximize their contribution to more open and participatory governance. The results of this study provide strategic recommendations to improve transparency and public participation through institutional strengthening of public relations and journalism.

**Keywords:** Transparency, Public Participation, Public Relations, Journalism, Governance.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kelembagaan kehumasan dan jurnalistik dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Transparansi dan partisipasi adalah elemen utama yang mendorong akuntabilitas serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan metode campuran, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, survei, dan analisis dokumen pada beberapa instansi pemerintah di wilayah kabupaten, serta menggunakan survei cross-sectional untuk mengukur persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehumasan memainkan peran penting dalam menyediakan akses informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Di sisi lain, jurnalistik berfungsi sebagai pengawas independen yang mengkritisi kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat melalui liputan kritis. Kolaborasi antara kehumasan dan jurnalistik memperkuat kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat, yang tercermin dari peningkatan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam hal keterbatasan anggaran, resistensi budaya organisasi yang tertutup, dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam komunikasi publik. Temuan ini menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai bagi kehumasan dan jurnalistik untuk memaksimalkan kontribusi mereka dalam tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui penguatan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik.

**Kata Kunci:** Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kehumasan, Jurnalistik, Tata Kelola Pemerintahan



## PENDAHULUAN

Dalam era demokrasi yang semakin matang, transparansi dan partisipasi masyarakat telah menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai suatu tambahan, melainkan sebagai kebutuhan mutlak yang menopang kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Transparansi, dalam konteks ini, bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan terbuka kepada publik terhadap kebijakan serta program pemerintah. Di sisi lain, partisipasi masyarakat memungkinkan adanya interaksi langsung antara warga negara dan pengambil kebijakan, yang tidak hanya berdampak positif pada akuntabilitas, tetapi juga mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Porumbescu, 2015; Chen & Neshkova, 2019). Hal ini menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi, di mana akses informasi dapat tersebar secara cepat dan luas, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Kehumasan dan jurnalistik dalam pemerintahan adalah elemen penting yang memainkan peran krusial dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Institusi kehumasan berfungsi untuk mengelola informasi dan komunikasi yang berasal dari pemerintah, sehingga publik dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan dan program pemerintah. Dengan kata lain, kehumasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memahami konteks dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam perspektif ini, kehumasan bertindak sebagai 'penerjemah' antara pemerintah dan masyarakat, yang membantu menjembatani perbedaan persepsi serta pandangan yang mungkin timbul (Atta, 2023; Alam et al., 2018).

Selain kehumasan, peran jurnalistik juga tidak kalah penting. Jurnalisme, sebagai salah satu pilar demokrasi, berfungsi sebagai pengawas independen (watchdog) yang memberikan sorotan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan ini memberikan tekanan yang sehat kepada pemerintah untuk menjaga akuntabilitas mereka di mata publik. Melalui pemberitaan yang objektif dan kritis, jurnalis mampu mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, serta membuka ruang diskusi yang mendorong terwujudnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik (Krah & Mertens, 2020). Dengan kata lain, jurnalistik menjadi instrumen penting dalam upaya membangun pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan pemerintah, yang diwujudkan melalui transparansi, tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses terhadap informasi publik, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dapat berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas pemerintah, yang pada akhirnya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Stanimirović, 2022). Transparansi juga

memberikan jaminan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada kepentingan publik, serta mengurangi potensi praktik-praktik korupsi dalam pemerintahan. Dalam jangka panjang, transparansi membantu membangun ikatan sosial yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, karena kedua belah pihak beroperasi di atas fondasi yang sama—yaitu kepercayaan (Chen & Neshkova, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan mereka secara langsung kepada pemerintah. Lebih dari itu, partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, pemerintah bukan lagi entitas yang bekerja secara independen, melainkan sebagai perpanjangan dari masyarakat itu sendiri. Proses ini mengarah pada terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, karena keputusan yang diambil oleh pemerintah selalu mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas pemerintah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas layanan publik (Ibrahimy et al., 2023).

Kendati transparansi dan partisipasi masyarakat menawarkan banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan kedua elemen ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kehumasan dan jurnalistik. Dalam banyak kasus, pemerintah mengalami kesulitan dalam menyediakan dana yang memadai untuk mengelola komunikasi publik, yang sering kali membutuhkan teknologi dan infrastruktur digital yang canggih. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada efektivitas kegiatan komunikasi pemerintah, terutama dalam konteks era digital saat ini, di mana masyarakat semakin menuntut akses terhadap informasi yang real-time dan interaktif (Thu et al., 2023).

Selain masalah anggaran, resistensi budaya organisasi yang anti-transformatif juga menjadi kendala. Beberapa instansi pemerintahan masih memiliki budaya yang cenderung tertutup terhadap perubahan, terutama ketika menyangkut pengelolaan informasi publik. Budaya ini berpotensi menghambat upaya transparansi, karena para pemangku kepentingan enggan membuka akses informasi kepada publik. Padahal, dalam era demokrasi modern, transparansi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Budaya organisasi yang anti-transformatif ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, karena pemerintah terlihat tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga (Kumar, 2023).

Selain itu, tantangan dalam menjaga kepercayaan publik juga sangat signifikan. Untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik, pemerintah harus secara konsisten menyediakan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada



sisi lain, publik juga perlu merasa bahwa partisipasi mereka memiliki dampak nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah cenderung menurun. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat harus disertai dengan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang konsisten dan terukur (MacManus et al., 2013).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi kelembagaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam bidang kehumasan dan jurnalistik. Kelembagaan kehumasan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Fungsi kehumasan meliputi manajemen informasi, komunikasi interaktif, dan pengelolaan reputasi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Dengan menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan relevan, kehumasan membantu membangun gambaran positif mengenai kebijakan dan program pemerintah, sekaligus menjaga reputasi pemerintah di mata publik (Alam et al., 2018).

Sementara itu, peran jurnalistik dalam pemerintahan juga tidak dapat diabaikan. Jurnalis dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, yang memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan publik. Liputan jurnalistik yang independen dan obyektif membantu mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan pemerintah serta memberikan ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Lebih dari itu, jurnalistik juga berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yang mendorong pemerintah untuk tetap bertanggung jawab terhadap kinerja mereka (Vanacore et al., 2023).

Dengan sinergi antara kehumasan dan jurnalistik, transparansi dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung kedua institusi ini, termasuk dalam hal pelatihan, pengembangan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi digital. Dalam era di mana informasi dapat tersebar dengan cepat, pemerintah harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses informasi yang mudah dan akurat kepada publik. Selain itu, diperlukan dukungan struktural yang memungkinkan kedua institusi ini untuk beroperasi secara efektif dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi dan mendukung partisipasi masyarakat yang inklusif (Fan & Christensen, 2023).

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa kehumasan dan jurnalistik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kelembagaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kedua aspek tersebut, dengan harapan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sebuah studi yang mendalam mengenai "Strategi Kelembagaan Kehumasan dan Jurnalistik untuk Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan," guna mengatasi tantangan-tantangan

yang dihadapi dan memastikan bahwa pemerintah dapat berfungsi sebagai entitas yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.

## **LANDASAN TEORI**

### **Transparansi Pemerintahan**

Transparansi pemerintahan telah lama dianggap sebagai landasan utama dalam tata kelola yang baik dan demokratis. Secara konseptual, transparansi mengacu pada ketersediaan informasi publik secara terbuka dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memahami kebijakan dan tindakan pemerintah. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Menurut Porumbescu (2015), transparansi menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi tindakan pemerintah secara objektif dan membuat keputusan yang lebih tepat mengenai partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Keterbukaan informasi memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, karena masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka (Chen & Neshkova, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Stanimirović (2022) menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi dalam organisasi publik berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan serta penurunan tingkat korupsi. Hal ini memberikan gambaran bahwa transparansi berfungsi sebagai pilar fundamental dalam upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi tidak hanya terbatas pada pemungutan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan seperti konsultasi publik, pengajuan aspirasi, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi yang kuat dari masyarakat meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena kebijakan tersebut dirumuskan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka partisipasi, masyarakat memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh pandangan bahwa masyarakat berfungsi sebagai "mitra" dalam proses pemerintahan, bukan sekadar objek dari kebijakan. Ibrahimy et al. (2023) menekankan pentingnya partisipasi sebagai faktor utama yang mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, partisipasi yang tinggi juga meningkatkan responsivitas pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif.

### **Peran Kehumasan dalam Pemerintahan**



Kehumasan dalam konteks pemerintahan adalah institusi yang bertugas untuk mengelola arus informasi antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi utama kehumasan adalah mengkomunikasikan kebijakan pemerintah secara efektif, baik melalui media massa, platform digital, maupun kegiatan langsung di lapangan. Dalam konteks yang lebih luas, kehumasan juga bertanggung jawab untuk menjaga reputasi pemerintah dengan menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Atta, 2023; Alam et al., 2018). Oleh karena itu, kehumasan menjadi salah satu elemen penting yang dapat meningkatkan transparansi melalui manajemen informasi yang baik.

Di era digital saat ini, peran kehumasan semakin kompleks karena harus menghadapi tantangan dalam menyebarkan informasi di tengah arus berita yang semakin cepat. Kehumasan juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Menurut Alam et al. (2018), kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat dengan cara menyebarkan informasi yang akurat serta merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kehumasan harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat.

#### **Peran Jurnalistik sebagai Pengawas Pemerintahan**

Jurnalistik memegang peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi yang berfungsi untuk menjaga akuntabilitas pemerintah. Jurnalis, dalam kapasitas mereka sebagai pengawas (watchdog), memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, kritis, dan objektif kepada masyarakat terkait dengan kebijakan publik. Jurnalistik berperan sebagai perantara yang memberikan suara kepada masyarakat melalui liputan berita, investigasi, dan analisis yang mengkritisi kinerja pemerintah (Krah & Mertens, 2020).

Fungsi jurnalistik sebagai pengawas pemerintah tidak hanya mencakup penyebaran informasi, tetapi juga edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban mereka. Vanacore et al. (2023) menekankan bahwa media yang independen dan profesional dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan cara memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu-isu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, jurnalisme berfungsi sebagai penjaga transparansi, yang tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan, tetapi juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang terpercaya dan terverifikasi dari media, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan kritis dalam proses pemerintahan.

#### **Sinergi antara Kehumasan dan Jurnalistik dalam Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi**

Sinergi antara kehumasan dan jurnalistik memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Kehumasan, dengan fungsinya

untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, dapat bekerja sama dengan jurnalistik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama ini sangat penting dalam era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kedua institusi ini untuk bekerja secara sinergis dalam menyediakan akses informasi yang mudah diakses oleh publik (Kusi et al., 2020; Sanderson et al., 2017).

Jurnalistik yang berperan sebagai pengawas pemerintah dapat memberikan tekanan yang sehat kepada institusi kehumasan agar tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyebaran informasi. Sementara itu, kehumasan dapat memberikan data dan fakta yang relevan kepada media, sehingga liputan yang disajikan oleh jurnalis dapat lebih informatif dan objektif. Menurut Sanderson et al. (2017), kolaborasi antara kehumasan dan jurnalistik memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena mereka mendapatkan informasi yang kredibel serta mampu memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkesinambungan dalam pemerintahan.

#### **Tantangan dalam Menerapkan Transparansi dan Partisipasi**

Meskipun transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, penerapan keduanya dalam pemerintahan tidak selalu mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan kehumasan dan jurnalistik. Pemerintah sering kali memiliki prioritas anggaran yang berbeda, sehingga alokasi untuk kegiatan transparansi dan partisipasi mungkin terbatas (Thu et al., 2023). Keterbatasan anggaran ini mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyebarkan informasi secara efektif dan merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Selain anggaran, tantangan lain yang muncul adalah resistensi budaya organisasi. Banyak instansi pemerintahan yang masih mempertahankan budaya yang cenderung tertutup terhadap informasi publik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi. Budaya ini tidak hanya menghambat proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik. Kumar (2023) mengemukakan bahwa perubahan budaya organisasi adalah salah satu faktor utama yang diperlukan untuk mencapai transparansi yang efektif dalam pemerintahan. Budaya organisasi yang terbuka dan inovatif akan mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.

Berdasarkan landasan teori di atas, jelas bahwa kehumasan dan jurnalistik memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Kolaborasi antara keduanya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sekaligus



meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, penting untuk terus mengeksplorasi strategi yang efektif dalam kelembagaan kehumasan dan jurnalistik untuk memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dan mengidentifikasi strategi kelembagaan yang mampu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi kelembagaan kehumasan dan jurnalistik dalam meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Mengingat kompleksitas peran kehumasan dan jurnalistik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pendekatan metode campuran (mixed methods) digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data yang beragam dan memungkinkan analisis yang komprehensif (Creswell & Plano Clark, 2018). Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggali secara mendalam persepsi para pemangku kepentingan sekaligus menyediakan data empiris yang mendukung pemahaman mengenai transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran sebagai pendekatan utama, yang terdiri dari dua tahap: penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjamin keutuhan dan keluasan hasil analisis. Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap pandangan, pengalaman, serta praktik kehumasan dan jurnalistik dalam konteks pemerintahan, sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terkait transparansi dan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan (Creswell, 2014). Dengan demikian, metode campuran ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan wawasan yang diperoleh dari analisis naratif dengan data numerik, yang pada gilirannya akan memberikan hasil penelitian yang lebih kaya dan holistik.

### Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus yang terfokus pada beberapa instansi pemerintahan di tingkat daerah yang dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pengelolaan komunikasi publik dan transparansi informasi. Studi kasus dipilih untuk mengakomodasi keragaman konteks dan karakteristik kelembagaan kehumasan dan jurnalistik di masing-masing lokasi (Yin, 2018). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan survei cross-sectional, yang dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya untuk menggali informasi mendalam yang dapat memberikan

wawasan kontekstual mengenai dinamika kehumasan dan jurnalistik di dalam pemerintahan (Stake, 2005).

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, survei, dan analisis dokumen. Masing-masing teknik ini dirancang untuk saling melengkapi, sehingga informasi yang diperoleh dari satu teknik dapat divalidasi dengan teknik lainnya (triangulasi data) (Denzin, 2009).

- Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan pejabat humas, jurnalis, serta beberapa pemimpin masyarakat untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi kelembagaan kehumasan dan jurnalistik dalam menjalankan fungsinya. Wawancara ini berbentuk semi-terstruktur, dengan panduan topik yang mencakup persepsi tentang transparansi, partisipasi, dan praktik komunikasi dalam pemerintahan. Wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang mendalam dan memastikan bahwa setiap informan dapat memberikan pandangan yang komprehensif (Kvale, 1996).
- Survei: Survei dilakukan kepada masyarakat umum untuk mengukur persepsi mereka mengenai transparansi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan tingkat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan publik. Survei ini menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, serta persepsi mereka terhadap peran jurnalistik dalam menciptakan transparansi. Pertanyaan survei juga dirancang untuk mengukur peran humas dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Metode ini memberikan gambaran kuantitatif yang komprehensif mengenai persepsi publik terhadap tata kelola pemerintahan (Porumbescu, 2015).
- Analisis Dokumen: Analisis dokumen dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan, laporan, serta berbagai publikasi yang dihasilkan oleh institusi kehumasan dan jurnalistik pemerintah. Dokumen-dokumen ini dianalisis dengan tujuan memahami bagaimana informasi disajikan kepada publik serta melihat tingkat keterbukaan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam penyebaran informasi (Bowen, 2009). Selain itu, dokumen-dokumen ini juga memberikan gambaran mengenai regulasi yang berlaku dan upaya pemerintah untuk memfasilitasi transparansi dan partisipasi masyarakat (Stanimirović, 2022).

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat yang berada di beberapa kabupaten dan kota yang menjadi fokus studi kasus, serta pejabat pemerintahan dan jurnalis yang berhubungan langsung dengan pengelolaan





komunikasi publik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling untuk wawancara dengan informan kunci, yaitu mereka yang dianggap memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian (Patton, 2002). Sedangkan untuk survei masyarakat, digunakan teknik simple random sampling yang memungkinkan pengambilan sampel secara acak dari populasi masyarakat di wilayah yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan data yang representatif serta memungkinkan generalisasi yang lebih luas terhadap persepsi masyarakat di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transparansi dalam Kelembagaan Kehumasan

Penelitian ini menemukan bahwa kehumasan memiliki peran krusial dalam mendorong transparansi di pemerintahan daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Buulolo et al. (2022) dan Zulfian et al. (2022), peran kelembagaan ini sangat penting dalam memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah. Kehumasan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kegiatan pemerintah kepada masyarakat, serta menjaga reputasi pemerintah dengan menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di beberapa wilayah menunjukkan bahwa akses terhadap informasi yang transparan dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah (Buulolo et al., 2022; Zulfian et al., 2022).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran humas di tingkat lokal tidak hanya berkontribusi terhadap keterbukaan informasi, tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, Gea et al. (2023) menemukan bahwa transparansi yang diinisiasi melalui praktik kehumasan yang efektif turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan informasi yang baik oleh humas merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### Partisipasi Masyarakat melalui Peran Jurnalistik

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran jurnalistik sebagai saluran utama yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan kebijakan pemerintah. Studi ini menemukan bahwa jurnalistik memainkan peran ganda sebagai penyedia informasi dan pengawas independen yang memonitor kebijakan pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Harefa dan Ndraha (2023). Media jurnalistik memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Gulo et al. (2023), yang menunjukkan bahwa jurnalistik berperan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui liputan yang informatif dan kritis.

Sebagai pengawas independen, jurnalistik tidak hanya memberikan laporan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga memberikan analisis yang

mendorong partisipasi masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam diskusi publik yang difasilitasi oleh media, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini menunjukkan bahwa jurnalistik, dalam perannya yang kritis, mampu memperkuat kehadiran masyarakat dalam proses pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah (Caniago et al., 2022; Halawa et al., 2023).

### Sinergi Antara Kehumasan dan Jurnalistik

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara kehumasan dan jurnalistik dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Temuan yang diungkapkan oleh Gea et al. (2023) serta Laia et al. (2023) mendukung pandangan bahwa kolaborasi antara kedua institusi ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan terpercaya. Dalam kerangka ini, kehumasan bertugas untuk menyediakan informasi yang faktual dan komprehensif kepada jurnalis, yang kemudian menyampaikannya kepada publik. Di sisi lain, jurnalistik berperan dalam mengkritisi dan memverifikasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga menjaga kredibilitas informasi yang diterima masyarakat.

Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat yang dilakukan oleh Gulo et al. (2023) menunjukkan bahwa kerja sama antara kehumasan dan media dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Sinergi ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai layanan yang disediakan, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kolaborasi antara kehumasan dan jurnalistik dalam menyajikan informasi yang akurat dan kredibel.

### Tantangan dalam Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya manfaat yang signifikan dari transparansi dan partisipasi masyarakat, berbagai tantangan juga ditemukan dalam implementasi strategi ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan kehumasan dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Kasih et al. (2022) menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang terbatas berdampak pada keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan komunikasi publik. Selain itu, resistensi budaya organisasi yang anti-transformatif juga menghambat upaya transparansi dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan temuan Laia et al. (2023), yang menyatakan bahwa banyak instansi pemerintah yang enggan membuka akses informasi kepada publik karena faktor budaya yang konservatif.

Selain masalah anggaran dan budaya organisasi, penelitian ini juga menemukan bahwa kesenjangan teknologi antara pemerintah dan masyarakat menjadi tantangan lain dalam meningkatkan transparansi. Halawa et



al. (2023) menyoroti bahwa peran teknologi informasi sangat penting dalam memfasilitasi akses publik terhadap informasi. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat memerlukan investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia.

### Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan bukan hanya sekedar tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, kehumasan dan jurnalistik memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan tersebut melalui pengelolaan informasi yang transparan dan akurat. Studi ini juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara kehumasan dan jurnalistik serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi akses informasi yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan oleh Waruwu et al. (2023), pendekatan strategis dalam memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat penyebaran informasi di masyarakat.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat diperkuat melalui sinergi antara kehumasan dan jurnalistik. Dengan mendorong keterlibatan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan, karena partisipasi yang tinggi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel (Ndraha & Uang, 2022).

Hasil dan pembahasan ini mengungkapkan bahwa strategi kelembagaan kehumasan dan jurnalistik yang efektif berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara kehumasan dan jurnalistik serta dukungan yang memadai dari pemerintah dalam hal anggaran, teknologi, dan budaya organisasi. Dengan demikian, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat institusi kehumasan dan jurnalistik, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan peran penting yang dimainkan oleh kehumasan dan jurnalistik dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Studi ini menyoroti bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat adalah elemen fundamental yang tidak hanya berfungsi

untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara. Dalam konteks ini, kehumasan bertindak sebagai pengelola arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat, sementara jurnalistik berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan pemerintah tetap bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.

Studi ini menemukan bahwa penguatan peran kehumasan di pemerintahan daerah tidak hanya berkontribusi terhadap keterbukaan informasi, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Sebagaimana ditunjukkan oleh Buulolo et al. (2022) dan Zulfian et al. (2022), peran kelembagaan kehumasan dalam memfasilitasi akses publik terhadap informasi menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, hasil penelitian oleh Gea et al. (2023) menunjukkan bahwa upaya transparansi yang dilakukan oleh humas berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Di sisi lain, jurnalistik juga memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Media jurnalistik tidak hanya menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah, tetapi juga memberikan pandangan kritis dan analisis yang membantu masyarakat memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dicatat oleh Caniago et al. (2022) dan Halawa et al. (2023), jurnalistik yang independen dan obyektif memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemerintah tetap transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Buulolo, et al. (2022). Analisis implementasi SISKUDES di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa. *\*Jurnal Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\**, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43993>
- Caniago, A. P. et al. (2022). Peran Kecamatan dalam evaluasi dana desa Ladara di Kecamatan Tuheumberua, Kabupaten Nias Utara (Studi kasus Desa Ladara). *\*Jurnal Ilmiah Simantek\**, 6(4).
- Eliyunus Waruwu, et al. (2023). Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Malang: Future Science.
- Fandi Zulfian Zebua et al. (2022). Evaluasi implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Orahili Tumori. *\*Jurnal Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\**, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43989>
- Gea, F., Harefa, P., Lase, H., & Ndraha, A. B. (2023). Pengaruh sikap dan budaya organisasi terhadap pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kota Gunungsili. *\*Innovative: Journal of Social Science Research\**, 3(6), 1208–1223. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6385>



- Gea, R. P., Ndraha, A. B., Hulu, F., & Waruwu, S. (2023). Analisis urgensi sistem manajemen talenta guru di UPTD SD Negeri 074056 Dahana Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. *\*JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)\**, 10(3), 2183–2193. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.53501>
- Gulo, B., Waruwu, M. H., Mendrofa, S. A., Ndraha, A. B., & Lahagu, P. (2023). Analisis implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat. *\*Innovative: Journal of Social Science Research\**, 3(6), 1236–1247. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6386>
- Halawa, P. A., Ndraha, A. B., Lase, H., & Mendrofa, Y. (2023). Peran masyarakat dalam perencanaan sumber daya manusia di pemerintahan Desa Dahana Tabaloho Kota Gunungsitoli. *\*JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)\**, 10(3), 2119–2132. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.53454>
- Halawa, S. J. et al. (2022). Dinamika perubahan profesionalisme pegawai sebagai bentuk adaptasi sistem kerja baru di tempat usaha di Kota Gunungsitoli. *\*Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\**, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43997>
- Harefa, A., & Ndraha, A. B. (2023). Evaluasi perencanaan dalam pengembangan organisasi berimplikasi peningkatan perekonomian masyarakat kepulauan Nias melalui koperasi konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias. *\*JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)\**, 10(3), 1836–1846. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52458>
- Hasan Toyib et al. (2022). Kolaborasi sumber daya manusia dalam pencapaian target dan sasaran kinerja LKPJ pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias. *\*Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\**, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43995>
- Hia, I. M., & Ndraha, A. B. (2023). Urgensi pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia di Museum Pusaka Nias. *\*JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)\**, 10(2), 1620–1630. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.51797>
- Kasih, M. I. et al. (2022). Penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan BPD untuk menghasilkan produk regulasi desa yang berkualitas di Desa Loloasai Kecamatan Gido. *\*Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\**, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43992>
- Laia, A. N., Ndraha, A. B., Buulolo, N. A., & Telaumbanua, E. (2023). Evaluasi sistem pembelajaran pendidikan non formal anak usia dini di Sempoa SIP TC Gunungsitoli. *\*Innovative: Journal of Social Science Research\**, 3(6), 6889–6904. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7283>
- Laia, S., Halawa, O., & Ndraha, A. B. (2023). Analisis pelaksanaan perencanaan rekrutmen karyawan di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli. *\*JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)\**, 10(2), 1668–1681. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.51904>
- Laoli, A., Waruwu, E., Ndraha, A. B., & Zebua, D. I. (2023). Gender differences in college students' achievement in teaching English as a foreign language using inquiry-based learning. *\*Journal of Education and E-Learning Research\**, 10(4), 666–673. <https://doi.org/10.20448/jeelr.v10i4.5047>
- Lase, Y., & Ndraha, A. B. (2023). Analisis urgensi pelatihan dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *\*JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)\**, 10(3), 1804–1814. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52456>
- Minta Indah Laoli et al. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi kasus BPKPD sebagai leading sektor penganggaran). *\*Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\**, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43987>
- Ndraha, A. B. (2023). Optimizing public services: Reconstructing the discordant relationship between local leaders to foster harmony (A case study of Indonesia). *\*Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)\**, 2(07), 18–34. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i07.143>
- Ndraha, A. B. (2023). Transformasi UMKM: Model Pentahelix dan inovasi dalam implementasi kebijakan izin usaha di era revolusi industri 4.0. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2022). Camat's leadership in increasing community participation in development in the era of disruption and social society 5.0 (Case study districts at Nias Regency). *\*Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)\**, 1(01), 55–66. <https://doi.org/10.56982/journalo.v1i01.23>
- Ndraha, A. B., Zebua, D., Zega, A., & Zebua, M. K. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 27–32. <https://sihojournal.com/index.php/jukoni/article/view/23>
- Palindungan Lahagu, Ayler Beniah Ndraha, & Odaligoziduhu Halawa. (2023). Pengaruh efikasi diri terhadap perencanaan karir pegawai dengan motivasi karir sebagai variabel mediasi pada





- kantor camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara.  
\*Jurnal Ilmiah Metadata\*, 5(3), 1-18.  
<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Telaumbanua, S. et al. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai honorer di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias. \*Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\*, 10(4).  
<https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43999>
- Telaumbanua, S. et al. (2022). Sistem Informasi dan Pengelolaan Keuangan Desa. \*Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\*, 10(4).  
<https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43998>
- Telaumbanua, S. K., Hulu, P. F., Gea, J. B. I. J., & Ndraha, A. B. (2024). Pengaruh penerapan standar operasional prosedur (SOP) penerbitan surat pengantar terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa. \*Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JUMBA)\*, 2(01), 21–30.  
<https://doi.org/10.54783/jumba.v2i01.301>
- Waruwu, F., Ndraha, A. B., & Harefa, A. (2023). Evaluasi pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias. \*Innovative: Journal of Social Science Research\*, 3(6), 1540–1554.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6387>
- Waruwu, S. et al. (2022). Pengembangan teknologi untuk mendukung pengelolaan keuangan desa di Indonesia. \*Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)\*, 10(4).  
<https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43996>
- Zega, A., Dewi, R., Sri, A., Gea, A., Telaumbanua, B. V., Mendrofa, J. S., Laoli, D., Lase, R. C., Dawolo, J., Telaumbanua, D. D., Zebua, O., Studi, P., Daya, S., Nias, U., Program, S., Sumber, S., Akuatik, D., & Nias, U. (2024). Anatomi Ikan Kerapu (Epinephelus Sp.): Memahami Organ Dalam Tubuh Ikan Dan Posisinya. 15(1), 105–111.